



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1887, 2015

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Renstra. Tahun
2015-2019

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 5. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

2. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dengan berdasarkan RPJM Nasional.
- (2) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berfungsi sebagai:
 - a. pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dan Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DARMIN NASUTION

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN
2015-2019

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

**Hasil-hasil yang telah dicapai Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian selama periode Tahun 2010-2014**

a. Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Secara umum kinerja perekonomian selama periode Tahun 2010-2014 cukup baik. Dalam lima Tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata 5,8% per-tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional cukup kokoh menghadapi berbagai tekanan dari eksternal maupun internal. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 dan Tahun 2014 hanya mencapai 5,8% dan 5,0% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 dan Tahun 2011 yang besarnya 6,3 % dan 6,5%.

b. Bidang Pangan dan Pertanian

Ketersediaan, ketercukupan, dan keterjangkauan pangan utama pada periode 2010-2014 secara nasional cukup stabil dan kondusif. Sektor Pertanian tumbuh rata-rata 4,18% per-tahun dan memberikan share sebesar 13,38% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014. Share terbesar sektor pertanian terhadap PDB adalah subsektor tanaman perkebunan (3,77%), disusul tanaman pangan (3,26%), perikanan (2,34%), hortikultura (1,51%), peternakan (1,58%) dan kehutanan (0,71%).

Produksi padi Tahun 2014 mencapai 70,61 juta ton, dan stok beras sampai dengan akhir 2014 sebesar 1,79 juta ton. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, sejak Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga pokok pembelian (HPP), dengan mengeluarkan Instruksi Presiden.

Petani sebagai ujung tombak dalam menghasilkan sumber pangan, maka sebagai upaya dalam menaikan taraf hidup petani sampai dengan 2014 hasilnya cukup positif, seperti terlihat dari Nilai Tukar

Pelani (NTI) Tahun 2014 (rata-rata Januari-Desember) yaitu sebesar 102,03. Tingkat inflasi pangan Tahun 2014 khususnya *volatile food* sebesar 8,36%, sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2013 (8,38%).

c. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam

Kebutuhan sumber daya alam energi sampai saat ini terus meningkat sebesar 7% per tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah dan pendapatan penduduk. Pada Tahun 2013, produksi minyak bumi mencapai 824 Setara Barrel Minyak (SBM). Ketergantungan penyediaan energi masih bertumpu pada minyak bumi dan masih memberi kontribusi sebesar 49,7% dari total kebutuhan, sedangkan energi baru dan terbarukan sebesar 3,7%. Sementara kontribusi penerimaan minyak dan gas bumi terhadap PDB rata-rata sebesar 7,8% pada periode Tahun 2010-2013. Sementara untuk memenuhi ketersediaan listrik dalam kurun lima Tahun terakhir telah dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik lebih kurang sebesar 17 Giga Watt (GW), sehingga kapasitas pembangkit listrik nasional sampai akhir Tahun 2014 diperkirakan akan mencapai sekitar 50,7 GW.

Dalam kurun waktu Tahun 2010 – 2013, persenan sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan sebesar 2,1% per-tahun. Adanya larangan ekspor bahan galian mentah mulai tanggal 12 Januari 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini diharapkan meningkatkan industri berbasis mineral logam, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam rangka perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara dilakukan sosialisasi kebijakan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) kepada para pemangku kepentingan yang terdiri atas Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang merupakan perusahaan mineral dan batubara serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas/KKKS dan Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah terutama untuk memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya transparansi penerimaan negara, penerimaan daerah, yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif.

d. Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, serta Ketnagakerjaan

Dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional yang telah dikoordinasikan

oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Kementerian/Lembaga terkait, dan asosiasi, pelaku usaha industri kreatif.

Sementara itu dalam mendukung pengembangan wirausaha telah dilakukan 3 (tiga) tahapan terintegrasi dalam pengembangan kewirausahaan 1) pembiasaan wirausaha (perubahan pola pikir dan *change management*), 2) pencapaian wirausaha melalui kompetisi bisnis plan dan pelatihan kewirausahaan, 3) pengembangan wirausaha melalui kemiraan, kolaborasi, pendampingan, penguatan kelembagaan inkubator bisnis baik di Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi dan industri dalam rangka peningkatan jumlah wirausaha muda berdaya saing dan inovatif. Selain itu, telah dilakukan juga beberapa hal lainnya seperti: 1) koordinasi rancangan *roadmap* pengembangan inkubator wirausaha, 2) koordinasi kurikulum *technopreneur* yang telah diterapkan pada universitas, dan 3) koordinasi inkubasi wirausaha ekonomi kreatif yang akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan *Jebel Ah Free Zone Area (JAFZA)*.

Capaian dalam rangka mendorong pengembangan UMKM diantaranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan kecil.

Untuk menghadapi persaingan tenaga kerja pada saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan optimalisasi BLK dan UPT bersinergi dengan pusat-pusat pelatihan swasta untuk mewujudkan *skilled labor* ketenagakerjaan Indonesia dan langkah-langkah penyusunan *roadmap* tenaga kerja nasional dan *grand strategy* ketenagakerjaan nasional dalam mendukung pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada Tahun 2015.

e. Bidang Perniagaan dan Industri

Dalam upaya mendorong pengembangan dan perbaikan iklim investasi di Indonesia salah satunya adalah dengan mendorong kemudahan berusaha di bidang investasi. Hal ini didukung dengan upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan pelaksanaan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai dasar hukum pembentukan kelembagaan PTSP baik di Pusat maupun Daerah. Dari Tahun 2009 hingga Tahun 2014 pembentukan PTSP di 561 seluruh wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang telah mencapai 493 PTSP, dan pada Tahun 2015 akan terbentuk seluruhnya.

Terkait dengan penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW), beberapa hasil program kerja, antara lain: telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*, yang memungkulkan layanan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan telah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan melibatkan 15 (lima belas) kementerian/lembaga atau lebih dari 18 (delapan belas) instansi penerbit perijinan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepabeanan dan kepelabuhanan serta pengawasan di bidang Peraturan Daerah/daerah.

Pengembangan industri manufaktur dilakukan melalui upaya penguatan struktur industri dan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa. Adapun capaian di bidang industri manufaktur, yaitu: (1) Telah dilakukan percepatan pengembangan industri petrokimia yang meliputi pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, dan revitalisasi industri pupuk; (2) Telah tersusunnya *tailor-made policy* untuk dapat mendorong pengembangan industri baja nasional; (3) Telah dilakukan upaya pengembangan kawasan industri di 14 kawasan di luar Pulau Jawa. Akan tetapi, terkait hal ini masih terdapat beberapa kendala dalam aspek lahan, infrastruktur, perizinan, dan aspek teknis.

Koordinasi pengembangan kawasan ekonomi diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis ekonomi yang fungsional, tertib ruang dan berkelanjutan. Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi media yang memberikan alternatif penyelesaian permasalahan/konflik pengembangan kawasan ekonomi. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain: (1) Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden sebagai revisi atas Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, (2) Dukungan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Peraturan Daerah/daerah Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, (3) Dukungan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Peraturan Daerah/daerah Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan (4) Dukungan rumusan kebijakan dan implementasi kerjasama pengembangan kawasan industri terpadu Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah selama 5 Tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada bidang infrastruktur sumber daya air hasil yang telah dicapai antara lain penyediaan akses layanan air minum layak sebesar 67%;

penetapan beberapa peraturan perundangan antara lain Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air dan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta dibangunnya beberapa bendungan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan lainnya.

Pada bidang transportasi, untuk penguatan sistem konektivitas dan logistik di luar Jawa telah dibangun infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api, bandara dan pelabuhan. Beberapa contoh infrastruktur yang telah dan sedang dibangun antara lain: Jalan Tol Trans Sumatera; Bandara Internasional Kualanamu; Jalur Rel Ganda (*Double Track*) Medan – Bandara Kualanamu; Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung; Pelabuhan Tanjung Apiapi, Sumatera Selatan; Pelabuhan Tanjung Sauh Batam; Jalur KA Batubara dan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan; Jembatan Laut Penyeberangan Merak – Bakauheuni; Jalan Trans Kalimantan; Pelabuhan Internasional Matuy, Kalimantan; Bandara Internasional Sepinggur; 3 Bandara di Wilayah Perbarasan Kalimantan Timur; Pelabuhan Makassar *New Port*; Jalan *By Pass* Padu-Parigi; Pelabuhan Hub Internasional Bitung; Jalan Tol Manado-Bitung; Jalan KA Makassar – Parepare; Bandara Internasional Lombok (DIL); *Coastal Ship* Peraturan Pemerintah lintas Jawa Bali Nusa Tenggara; Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali; Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan PIR) dan Trans Maluku; Pelabuhan Sorong di Seget; serta beberapa pelabuhan dan bandara di Papua dan Kepulauan Maluku.

Pada bidang penataan ruang telah dihasilkan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kota/Kabupaten dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Kota. Dengan demikian hingga saat ini telah ditetapkan sejumlah 27 Peraturan Daerah RTRW Provinsi (79,41%), 327 Peraturan Daerah RTRW Kabupaten (82,16%), dan 82 Peraturan Daerah RTRW Kota (88,17%). Sedangkan untuk Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan telah ditetapkan 4 Peraturan Presiden dan untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah diterapkan 7 Peraturan Presiden dari 76 KSN yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Hasil penting lainnya guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur adalah Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada Tahun 2011 yang telah dapat merealisasikan proyek sebesar Rp838,9 Triliun baik untuk sektor infrastruktur maupun riil yang tersebar di seluruh koridor Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua Maluku serta upaya untuk merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Komite ini diharapkan

ke depan akan mampu menjadi *delivery unit* di bidang infrastruktur yang akan terlibat sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas.

Pada bidang Telematika telah dihasilkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia, yang menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan di sektor Telematika yang meliputi empat pilar utama, yaitu aspek Regulasi, Legislasi dan Kelembagaan, aspek Pendanaan, aspek prasarana dan keamanan, serta aspek adopsi dan utilisasi kreatif. Pemerataan akses telekomunikasi pun semakin membaik ditunjukkan dengan meningkatnya daerah yang terakses layanan telekomunikasi seperti desa dering sebanyak 33.185 desa, desa pintar atau desa punya internet berjumlah 1.330 desa.

Sementara pada bidang Utilitas telah dihasilkan Kajian untuk percepatan implementasi Kebijakan *Sanitary Landfill*, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

g. Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

Di akhir Tahun 2015, Indonesia akan memasuki *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Untuk mendorong komitmen Indonesia dalam AEC 2015 beberapa upaya telah dilakukan yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi nasional dan melaksanakan komitmen Cetak Rincin Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Hasil-hasil yang telah dicapai berupa ratifikasi perjanjian dalam bentuk Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri serta sosialisasi AEC ke daerah guna memberikan pemahaman dan mengidentifikasi kesiapan tiap daerah dalam rangka menghadapi AEC.

Sebagai persiapan menghadapi AEC 2015, Indonesia telah menyusun *Policy Paper* tentang kesiapan Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing nasional. *Policy paper* tersebut antara lain berisi uraian mengenai peluang dan tantangan serta identifikasi masalah yang ada utamanya terkait dengan hal peningkatan daya saing nasional.

Indonesia juga telah memperkuat kerjasama ekonomi internasional meliputi, kerjasama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral. Pencapaian dari kerjasama ekonomi bilateral Asia ditunjukkan dengan selesainya pembangunan peleburan baja Krakatau-POSCO tahap pertama dan pembangunan pabrik ban Hankook Tire di Cikarang serta pembangunan *flagship project* yaitu: 1) Jakarta Mass Rapid Transit (MRT); 2) Perluasan dan pembangunan Bandara Internasional Soekarno Hatta; 3) Pembangunan *New Academic Research Cluster*, dan 4) Pembangunan *sewerage system* di DKI Jakarta.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Tantangan dan peluang perekonomian Indonesia lima tahun ke depan, banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang kemungkinan pertumbuhannya moderat. Selain pertumbuhannya yang tidak tinggi, episentrum kegiatan ekonomi dunia diperkirakan akan bergerak dari Penua Eropa dan Amerika ke Asia Pasifik. Di tahun-tahun yang akan datang komoditas yang diperdagangkan sudah tidak lagi hanya diramalkan oleh barang, tetapi juga jasa. Miran modal ke negara berkembang diperkirakan akan terus berlanjut meningkat, seiring dengan dibukanya pasar yang lebih luas dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Asia Pasifik. Di ASEAN sendiri, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai tanggal 31 Desember 2015.

Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global yang memprioritaskan besarnya pasar, membuat banyak Peraturan Daerah, investasi, dan industri bergerak ke Negara berkembang dengan pasar domestik besar seperti, India, Brazil, dan Indonesia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Negara-negara berkembang terhadap PDB dunia diperkirakan akan tumbuh signifikan dari 34% di Tahun 2010 menjadi 43,8 % di akhir Tahun 2019.

Untuk kondisi dalam negeri, di Tahun pertama Kabinet Kerja, indikator-indikator ekonomi makro masih banyak dipengaruhi oleh perubahan dan penyesuaian faktor non-ekonomi. Untuk lima Tahun ke depan indikator ekonomi diprediksi akan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN 2015-2019 dan APBNP 2015

Indikator Makro Ekonomi	Baseline 2014	APBNP 2015	Sasaran 2019
• Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,7	6,0
• PDB per Kapita Tahun Dasar 2010 riba Rp	43.403	47.804	72.217
• PDB per Kapita Tahun Dasar 2000 riba Rp	41.103		
• Inflasi (%)	8,4	5,0	3,5
• Selangan Devisa (US\$ Miliar)	111,8	119,9	N.A
• Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.878	12.500	N.A
• Basis Pemajakan Pajak/PDB (%) Tahun Dasar 2010	11,6***	13,2*	16
• Tingkat Kemiskinan (%)	10,96 [†]	10,3	7,9 - 8,0
• Tingkat Pengangguran (%)	5,64	5,6	4,0 - 5,0

† Data Tahun 2015-2019 termasuk pajak daerah

** Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan Desember 2014

***Termasuk pajak daerah sebesar satu % PDB

Tabel 1.2
Sasaran Pokok Pembangunan Ekonomi RPJMN 2015-2019

Indikator	Baseline 2014	Sasaran 2019
• Kedauletan Pangan		
• Padi (Juta Ton)	70,3	82,0
• daging Sapi (Kiloh Ton)	452,7	735,1
• Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan awa (Juta Ha)	8,9	0,80
• Pembangunan waduk	21	48
• Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
• Akses Air Minum Layak (%)	70	100
• Kondisi jalan raya nasional (%)	94	98
• Pembangunan jalan baru (komulatif 5 Tahun)	1.202 km	2.659 km
• Pengembangan jalan tol (komulatif 5 Tahun)	807 km	1.000 km
• Pengembangan pelabuhan	278	450

Sumber: Tabel 1 RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian, maka pokok rencana kerja Kementerian diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yakni 1. menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat struktur ekonomi, 2. realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, di bidang ekonomi terutama percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan pembangunan industri, 3. meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kepercayaan investor, serta 4. meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan tantangan di bidang perekonomian yang dihadapi Indonesia pada masa mendatang semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan dan tantangan tersebut, jika tidak direspon secara tepat dan cepat dikhawatirkan berdampak pada tidak sebahnya kondisi perekonomian nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ditinjau perubahan lingkungan strategis baik dari dalam negeri maupun luar negeri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa potensi dan permasalahan perekonomian yang memerlukan fokus koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Dalam RPJMN 2015-2019, target pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 sebesar 5,8%, 7,1% di Tahun 2017, dan 8,0% di Tahun 2019. Mengingat pencapaian Tahun 2014 sebesar 6,1%, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada Tahun 2017 merupakan

target yang tinggi dengan waktu yang singkat. Selain tantangan dari luar seperti masih rendahnya kinerja ekspor sejalan dengan lemahnya permintaan dunia, juga diperlukan satu sinergisitas antara pemangku kepentingan dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Diperlukan upaya, kerja keras dan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan perlu memperkuat kapasitasnya selaku lembaga koordinator dan pengendalian untuk meminimalkan ketidaksiharian /inkonsistensi antara rencana dengan implementasi program/kegiatan pembangunan, khususnya di bidang perkeonomian dan ketidaksiharian antar sektor serta pemerintah pusat dan daerah.

b. Ekonomi Makro dan Keuangan

Potensi dan permasalahan eksternal maupun internal yang akan dihadapi pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan perkembangan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan
- Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut.
- Perataan perundang-undangan pusat dan daerah yang saling tumpang tindih dan kontradiksi telah menjadi kendala untuk mendorong perkeonomian.
- Kapasitas SDM Indonesia masih terbatas, ditandai dengan tingkat pendidikan pada pekerja Indonesia juga produktivitasnya.
- Penerapan dan penguasaan teknologi masih terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
- Kemampuan pembiayaan pembangunan terbatas. Oleh karena itu, penggalan sumber-sumber pembiayaan dan mengoptimalkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi

c. Non Tariff Barrier dan Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Untuk melindungi pasar domestiknya sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa Tahun lalu, sebagian negara tujuan ekspor masih akan menerapkan hambatan Peraturan Daerah/daerah berupa *non tariff barriers (NTBs)* dihubung-hubungkan dengan masalah kesehatan, lingkungan, sanitasi dan sebagainya. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi berbagai persyaratan sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor.

MEA 2015, merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai: 1) pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan berdaya

saing tinggi; 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) integrasi kedalam perekonomian dunia. Selain peluang besar dalam dunia usaha dengan diberlakukannya MEA, terdapat permasalahan dimana negara-negara ASEAN masih memberlakukan aturan/kebijakan *non tariff barriers* yang menghambat ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia menjelang pelaksanaan MEA 2015. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha agar mendapatkan manfaat dari MEA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional mempunyai peranan besar dalam persiapan menghadapi implementasi dan memperoleh keuntungan dari implementasi MEA. Sosialisasi dan edukasi tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja menjadi aset untuk meraih keberhasilan MEA 2015.

d. Mengembangkan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Pengembangan maritim dan kelautan dilaksanakan dengan melepaskan peran ekonomi maritim dan sinergisitas pembangunan kelautan nasional yang tersebar di berbagai K/L dan Daerah. Potensi sumber daya kelautan yang besar menjadikan peluang semakin meningkatnya kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan nelayan. Dalam rangka meningkatkan konektivitas laut dan sistem logistik ditunjukkan dengan pengembangan Tol Laut, melalui peningkatan pelayanan angkutan perintis, pengembangan 24 pelabuhan dan 60 dermaga penyeberangan, dan peningkatan kemampuan industri maritim dan perkapalan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan koordinasi antar sektor dan lembaga dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan.

e. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kewirausahaan

Kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pelaku ekonomi adalah modal utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu kuantitas dan kualitas SDM pelaku ekonomi perlu terus selalu ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Tantangan ke depan adalah menyediakan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, seperti misalnya sarjana logistik, ahli pramata pelabuhan, negosiator, dan ahli manajemen resiko. Selain itu juga harus didorong kemampuan dan kapasitas wirausaha pelaku ekonomi Indonesia. Dalam rangka berkompetensi dengan tenaga

kerja di pasar ASEAN maupun internasional, perlu juga didorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat bersaing.

f. Pembiayaan Pembangunan

Salah satu permasalahan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan, khususnya infrastruktur adalah keterbatasan pendanaan/anggaran. Keterbatasan tersedianya infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama dalam peningkatan investasi dan penyebab mahalanya biaya logistik. Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Untuk mengatasinya diperlukan upaya-upaya peningkatan penerimaan/pendapatan dan peningkatan kualitas belanja negara. Optimalisasi ruang fiskal dalam kualitas belanja negara terutama pada pengendalian subsidi energi dan perbaikan belanja aparatur. Dari sisi penerimaan negara, salah satu yang dihadapi adalah masih rendahnya *tax coverage ratio* sehingga realisasi penerimaan masih di bawah potensinya. Peningkatan penerimaan negara, terutama peningkatan penerimaan perpajakan, dapat dilakukan melalui penguatan SDM dan kelembagaan perpajakan dan kepatuhan, perbaikan administrasi perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak, dan penegakan hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak. Selain optimalisasi sektor perpajakan, optimalisasi pembiayaan pembangunan diperoleh dari pemanfaatan pinjaman luar negeri yang selektif, pemanfaatan pembiayaan dalam negeri, seperti Surat Berharga Negara/Surat Berharga Syariah, serta pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah Swasta/*Public Private Partnership* (KPS/PPP).

g. Pangan dan Pertanian

Pembangunan pangan dan pertanian, menghadapi tantangan utama konversi lahan pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus meningkat. Untuk itu, sistem pertanian skala luas (*food estate*) harus dapat segera direalisasikan, dan dibuka kepada dunia usaha baik nasional, swasta maupun asing, namun dengan porsi dan pengaturan yang adil.

Ketersediaan pangan, melalui peningkatan produksi pangan, sangat penting bagi tercapainya stabilitas harga pangan dan inflasi. Mengingat komponen komoditi pangan memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan IHK.

Selanjutnya, subsidi pertanian, baik subsidi harga, subsidi bunga maupun subsidi-subsidi lainnya termasuk pupuk dan benih, masih terus diperlukan. Namun perlu dievaluasi kembali dalam pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat penggunaan. Di bidang pembiayaan, perlu disusun *grand design* skema kredit program pertanian yang mudah diakses oleh petani.

Di bidang pembenihan, perlu pengembangan pusat-pusat perbenihan di tingkat petani maupun perusahaan perbenihan yang memenuhi

standard kualitas perbenihan nasional maupun global. Pembangunan pertanian juga sangat penting bagi upaya pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan yang sebagian besar mengandalkan sumber pendapatannya dari pertanian. Selain tantangan di dalam negeri juga laulauangan produk pangan dan pertanian dari luar negeri dengan diberlakukannya MTA 2015.

h. Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan disektor energi adalah terbatasnya pasokan energi primer dalam 5 tahun kedepan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dari kemampuan pasokan yang ada, termasuk optimalisasi penggunaan gas dan batubara serta meningkatkan kontribusi sumber energi baru dan terbarukan Termasuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dan panas bumi. Selain itu dari sisi pemanfaatannya perlu terus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Permasalahan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi untuk pembangunan adalah peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan pengelolaan secara berkelanjutan. Ketergantungan terhadap minyak bumi perlu dikurangi sehingga bauran energi menjadi lebih sehat dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas alam. Konsumsi energi juga perlu dikelola dengan baik sehingga pemborosan serta jumlah emisi dapat dikurangi.

Permasalahan di sektor kehutanan terutama adalah tata kelola hutan yang belum efektif dan efisien dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Diversifikasi produk diperlukan sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai penyedia bio energi untuk mendukung penyediaan energi terbarukan, pangan untuk mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarmasi untuk mendukung pengembangan industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan baku industri biotekstil dan bioplastik. Ketidakhadiran pengelola/KPTI ditingkat tapak menyebabkan sejumlah permasalahan yang tidak dapat segera ditangani, seperti *illegal activities (logging, hunting, encroaching)*, pencurian plasma nutah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan.

Permasalahan yang dihadapi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) antara lain adalah: (1) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi, (2) pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal, (3) luas hutan dan lahan kritis yang masih tinggi dan laju deforestasi yang masih relatif tinggi,(4) kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal, (5) pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal, dan (6) dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Perubahan iklim yang berjalan lebih cepat dari dekade

sebelumnya, disebabkan meningkatnya percepatan penumpukan terutama CO² di atmosfer bumi akibat pembakaran energi fosil, deforestasi atau kerusakan hutan, serta proses industri, yang menimbulkan efek gas rumah kaca. Beberapa kajian menunjukkan terjadinya bencana atau kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim, sehingga memberi dampak terhadap berbagai sektor di Indonesia, seperti kesehatan, pertanian, dan perekonomian nasional.

1. Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya saing KUKM dan Ketenagakerjaan/Buruh

• **Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Industri yang menggerakkan ekonomi kreatif disebut industri kreatif, yang terdiri dari 15 kelompok industri inti, yaitu : (1) arsitektur; (2) desain; (3) film, video, dan fotografi; (4) kuliner; (5) kerajinan; (6) mode; (7) musik; (8) penerbitan dan percetakan; (9) permainan interaktif; (10) periklanan; (11) penelitian dan pengembangan; (12) seni rupa; (13) seni pertunjukan; (14) layanan komputer dan piranti lunak; dan (15) televisi dan radio. Pada Tahun 2013, kontribusi industri kreatif terhadap PDB nasional sebesar 7,05 % (Rp. 611,81 triliun), atau peringkat ke 7 dari 10 sektor kontributor PDB nasional. 5 (lima) kelompok industri yang menjadi penyumbang PDB industri kreatif terbesar yaitu : (1) Kuliner (32,51%); (2) Mode (28,29%); (3) Kerajinan (14,44%); (4) Penerbitan dan percetakan (8,11%); dan Desain (3,90%). Terdapat 5,4 juta usaha kreatif yang menyerap 11,8 juta tenaga kerja. Industri kreatif juga mampu menyumbangkan devisa negara melalui ekspor sebesar US\$ 3,2 miliar. Mengacu kepada RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan ekonomi kreatif pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN		Baseline	2019
1	Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	7,1%	12%
2	Tenaga Kerja (juta orang)	12	13
3	Kontribusi Ekspor/Devisa Bruto	5,8%	10,0%

Dalam penyelenggaraan MEA 2015, perlu dilakukan peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan serta profesional dunia usaha di sektor ekonomi kreatif, khususnya pada sektor-sektor jasa yang terkait dengan 8 (delapan) *Multi Recognize Arrangement* (MRA).

Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif ke depan, yaitu : (1) penyediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif; (2) penyediaan sumber daya pendukung yang berkualitas, beragam dan kompetitif; (3) penguatan struktur industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; (4) penyediaan pembiayaan yang sesuai dan kompetitif; (5) perluasan pasar bagi karya kreatif; (6) penyediaan infrastruktur teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor rendahnya daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global saat ini.

• **Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambak, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor sektor primer, sekunder dan tersier. Pada Tahun 2013, jumlah UMKM sebanyak 37,30 juta, atau 99,99 % dari jumlah usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 114,11 juta (97 %). Kontribusi UMKM terhadap PDB dan ekspor masih lebih kecil dibandingkan usaha skala besar yang jumlah unit usahanya jauh lebih sedikit, yaitu sebesar 59 % terhadap PDB dan 14,06 % terhadap ekspor. Sementara jumlah koperasi per-tahun 2014 sebanyak 209.488 unit usaha, sekitar 70 % diantaranya koperasi aktif, dengan jumlah anggota sebanyak 36.44 juta orang.

Sasaran peningkatan kewirausahaan, daya saing koperasi dan UMKM dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN		SASARAN 2015-2019
1	Rata-rata pertumbuhan nilai PDB UMKM dan Koperasi	6,5-7,5% per-tahun
2	Rata-rata pertumbuhan produktivitas UMKM	5,0-7,0 % per-tahun
3	Pertambahan jumlah wirausaha baru	1 juta unit (kumulatif 5 Tahun)
4	Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	55,0% (Tahun 2019)
5	Rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi	13,5-18,0

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro informal dengan aset dan

produktivitas yang rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan Peraturan Daerah/daerah. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Sementara, koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kondisi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya : (1) keterbatasan kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis produksi; (2) keterbatasan akses ke pembiayaan; dan (3) keterbatasan kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

- **Ketenagakerjaan/Buruh**

Investasi PMDN dan PMA semakin meningkat di Indonesia sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, ketenagakerjaan Indonesia (terampil, *middle skill*, dan *high skill*) berpotensi cukup besar dan menjanjikan untuk berperan serta dan terlibat di dalam proses industri. Ketenagakerjaan Indonesia dari sisi upah berdaya saing dibandingkan dengan tenaga kerja asing (khususnya ASEAN) yang tingkat upahnya tinggi. Namun di sisi lain tingkat kompetensi masih relative rendah. Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan evaluasi dan peningkatan optimalisasi pusat-pusat pelatihan pemerintah dan dunia usaha/industri.

Posisi penyempitan ketenagakerjaan pada Tahun 2013-2014 terjadi penurunan diakibatkan oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 6,3% (semester I dan semester II Tahun 2013) menjadi 6% pada semester III dan semester IV Tahun 2013. Penurunan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut sampai dengan akhir Tahun 2014 menjadi 5,2% sampai 5,3% (diatas ekspektasi). Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut secara otomatis terjadi penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja Tahun 2013-2014 yaitu dari 1 juta netto tenaga kerja baru menjadi ±400 ribu tenaga kerja netto. Permasalahan tersebut disamping diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi diatas ekspektasi juga disebabkan : (1) Tidak

optimalnya pusat-pusat pelatihan pemerintah (Badai Besar Latihan Kerja/BBBLK, Balai Latihan Kerja/BLK, dan Unit Pelaksana Teknis/UPT) yang tidak bersinergitas dengan pusat-pusat pelatihan swasta/industri padat karya, dan industri lainnya, termasuk tidak terlaksananya dengan baik pelatihan/*vocational training* terhadap tenaga kerja informal oleh industri padat karya; (2) Tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia (informal) mayoritas berpendidikan SD dan SMP kelas 2, sehingga begitu sulitnya dunia industri menyerap tenaga kerja/buruh disamping bergejolaknya kenaikan upah (UMP dan UMK) baik di provinsi, kabupaten/kota; (3) Terjadi perubahan penyerapan tenaga kerja dari industri padat karya menjadi industri padat modal sehingga tenaga kerja semakin berkurang oleh karena pemakaian mesin-mesin, baik di industri padat karya maupun industri padat modal (Tahum 2014); (4) Pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi terhadap tenaga kerja terampil mengalami hambatan akibat persyaratan yang ditetapkan oleh WTO dipersyaratkan tenaga kerja yang profesional dan MEA 2015 dipersyaratkan dengan jenjang pendidikan terendah adalah Diploma III setara dengan politeknik.

j. Pergiagaan dan Industri

Masyarakat ekonomi ASEAN akan mulai diimplementasikan pada akhir Tahun 2015. Disamping menimbulkan implikasi berupa tantangan bagi industri dalam negeri karena persaingan di pasar domestik dan internasional yang lebih ketat, MEA 2015 juga membawa dampak berupa potensi akses pasar yang lebih luas bagi barang dan jasa dalam negeri. MEA sebenarnya bukan hanya berdimensi liberalisasi Peraturan Daerah/daerah barang dan jasa melalui penciptaan pasar dan basis produksi tunggal di kawasan ASEAN, tetapi MEA juga bertujuan untuk mengembangkan ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi, memiliki pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Pada Tahun 2030 penduduk usia kerja Indonesia dapat diperkirakan mencapai 280 juta jiwa. Ini merupakan potensi besar yang dapat *men-drive* pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, profil demografi yang didominasi usia muda ini apabila tidak di-*manage* dengan baik juga akan menimbulkan permasalahan sosial tersendiri, khususnya ketika lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja.

Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kapasitas produksi untuk meningkatkan nilai investasi bagi perusahaan mendorong pengurangan tenaga manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini berdampak terhadap timbulnya penciptaan lapangan kerja baru. Kondisi politik baik di tingkat lokal maupun nasional yang tidak

konduktif cenderung berdampak turunnya minat investor dalam berinvestasi.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB nasional pada triwulan IV 2014 yaitu sebesar 21,28%. Akan tetapi, ekspor industri pengolahan non migas tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, hilirisasi industri perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing industri nasional dengan meningkatkan ekspor dan membangun industri substitusi impor. Upaya hilirisasi industri melalui pengembangan kawasan industri berbasis bahan mineral masih memiliki beberapa kendala dalam aspek tata ruang, aspek perizinan, aspek teknis (ketersediaan bahan baku), dan aspek infrastruktur. Dalam hal ini, perlu adanya koordinasi kementerian/lembaga terkait untuk mendorong penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.

Sementara itu, pengembangan *backbone industry* seperti industri baja dan industri petrokimia terkendala beberapa hal berikut: (1) Masih tingginya impor baja untuk memenuhi kebutuhan baja nasional, karena rendahnya tarif bea masuk impor di Indonesia serta tidak ada peningkatan kapasitas yang signifikan oleh produsen baja dalam negeri. Pada Tahun 2013, sebesar 8,4 juta ton atau 66% kebutuhan baja domestik (12,7 juta ton) dipenuhi oleh baja impor; (2) Turunnya harga baja global pun mempengaruhi pengembangan industri baja nasional, harga *Hot Rolled Coils* (HRC) mengalami penurunan yang cukup tajam dari USD 705 pada Tahun 2011 menjadi hanya USD 536 pada Q3 Tahun 2014. Permasalahan lainnya yaitu adanya *over-supply* baja produksi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mencapai 51 juta ton pada 2014; dan (3) Sulitnya mendapatkan kepastian bahan baku menjadi permasalahan dalam pengembangan industri petrokimia.

Dalam upaya pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) Belum adanya mekanisme pengaturan (*legal*) terkait insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat secara langsung diimplementasikan pada lokasi pengembangan kawasan industri; (2) Belum adanya kajian hasil inventarisasi potensi komoditi unggulan lokal non-mineral yang optimal sebagai basis potensi pengembangan yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat secara langsung diserap dan dikembangkan dalam kawasan industri; (3) Belum adanya dukungan kebijakan yang optimal terkait kelembagaan dan operasional pengembangan Kawasan Peraturan Daerahgangan dan Pelabuhan Bebas (KPRPD) sebagai salah satu basis kawasan untuk peningkatan industri dan Peraturan Daerahgangan berorientasi pasar ekspor; dan (4) Belum adanya regulasi yang optimal yang dapat menjadi arahan dalam pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang Ekonomi, terutama KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

k. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- **Infrastruktur Sumber Daya Air**

Permasalahan pembangunan infrastruktur sumber daya air dari Tahun ke Tahun semakin meningkat yang ditandai dengan rendahnya kapasitas tampungan air per kapita per-tahun yang merupakan indikasi rendahnya ketahanan air; menurunnya ketersediaan air sebagai dampak dari berkurangnya daerah tangkapan air; meningkatnya konflik pemanfaatan air sebagai dampak semakin menurunnya ketersediaan air; tingginya alih fungsi lahan sawah yang harus diimbangi dengan peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan; dan belum dimanfaatkannya potensi *hydropower* yang melimpah sebagai *green energy*. Di samping itu penggunaan air tanah secara berlebihan berdampak pada masalah lingkungan berupa penurunan muka air tanah, berkurangnya resapan air, dan penurunan permukaan tanah yang mengakibatkan semakin meluasnya daerah rawan banjir di musim penghujan.

- **Telematika dan Utilitas**

Pergeseran paradigma pembangunan ekonomi Indonesia dari berbasis pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) ke basis inovasi memerlukan ketersediaan infrastruktur telematika khususnya *broadband*. Dengan tingkat adopsi dan penetrasi penggunaan internet dan ponsel yang sedemikian masif, tentunya pembangunan ekonomi berbasis inovasi sangat mungkin untuk diwujudkan. Selain itu, konektivitas antar pulau yang belum sempurna menjadikan telematika salah satu solusi yang paling tepat untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Keberadaan peluang tersebut tentunya tidak lepas dari hambatan dan tantangan. Tingkat penetrasi Indonesia masih sangat tertinggal secara global, bahkan dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, ataupun Thailand. Keberadaan tulang punggung telekomunikasi khususnya kabel serat optik pun masih belum merata dan masih terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi khususnya di wilayah Indonesia bagian barat.

Sementara untuk bidang utilitas permasalahan utama masih ada di sektor persampahan, drainase dan air limbah. Ketiga sektor ini belum menjadi prioritas sehingga pendanaan untuk pembangunan sektor ini masih sangat jauh dari kebutuhan. Masalah utama persampahan adalah 99% Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah saat ini masih dioperasikan secara *open dumping* meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tenggat waktu terakhir bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan TPA di daerahnya menjadi TPA yang ramah lingkungan pada Tahun Tahun 2013 serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah. TPA *open dumping* ini

sangat membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi, mulai dari bahaya longsor, gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Sementara untuk drainase perkotaan permasalahan masih pada genangan dan banjir yang selalu terjadi setiap tahunnya dengan peningkatan luas dan intensitasnya. Disamping itu belum ada pemisahan secara khusus antara saluran drainase air hujan dengan saluran air limbah sehingga terdapat tingkat pencemaran yang tinggi ke dalam badan air yang merusak persediaan air minum dan mengancam kesehatan masyarakat.

- **Transportasi**

Sistem transportasi yang handal adalah pilar utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sistem transportasi mempunyai fungsi untuk menghubungkan pusat produksi barang dan jasa dengan pusat distribusinya. Permasalahan utama bidang transportasi adalah masih terkonsentrasinya pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia barat dan tengah khususnya di kota-kota besar sehingga di Indonesia bagian timur dan daerah perbatasan tingkat aksesibilitas dan konektivitasnya masih rendah. Di samping itu, masih ada kebijakan yang timpang tidak baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan pemerintah daerah secara vertikal memampatkan kewenangan pemerintah daerah terkait otonomi daerah sehingga ada kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpotensi bertabrakan. Oleh karena itu perlu sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas di kota – kota besar di Indonesia masih belum terurai secara baik. Penyediaan angkutan massal dengan kualitas yang baik juga masih minim sehingga belum dapat mendorong sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu terdapat masalah pembebasan lahan, belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi dan lemahnya penegakan hukum yang juga menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur transportasi.

- **Pertanahan dan Penataan Ruang**

Permasalahan di bidang Penataan Ruang antara lain belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang dalam skala besar; muatan substansi, muatan MP3EI, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) serta tingkat ketelitian peta antara RTRWN, RTRW Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; RTRW belum dijadikan sebagai acuan rencana pembangunan berbagai sektor; belum tersedianya indikator kinerja pelaksanaan penataan ruang baik di tingkat

pusat maupun daerah; belum tersedianya mekanisme Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam penyelesaian permasalahan sengketa dan konflik pemanfaatan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) serta masih terhambatnya pemepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

- **Pertanahan**

Kurangnya pemahaman stakeholder mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akses pembiayaan untuk pelepasan tanah masing-masing sektor masih sangat terbatas. Mekanisme/proses pengadaan tanah yang membutuhkan waktu yang lama. Administrasi pertanahan di daerah yang masih lemah.

- **Perumahan**

Permasalahan bidang perumahan antara lain masih tingginya angka *backlog* perumahan, peningkatan harga rumah setiap Tahunnya sehingga semakin tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sumber pembiayaan perumahan yang masih terbatas, lahan untuk perumahan yang terbatas, inovasi teknologi untuk perumahan masih terbatas, masih rendahnya keterlibatan pemerintah daerah untuk memenuhi ketersediaan perumahan di daerah masing - masing, terhambatnya proses pembahasan rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat karena belum adanya kesepakatan mengenai besaran jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat maupun pemerintah serta pemberi kerja khususnya pekerja di sektor swasta.

- **Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)**

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan KPS masih lemah. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai pelaksanaan KPS. Tingkat pemahaman pelaksanaan KPS sesuai dengan prosedur dan standar masih rendah. Dukungan pembiayaan pemerintah masih terbatas contohnya pembiayaan untuk *Project Development Fund* (PDF), transaksi, kontribusi pemerintah seperti *Viability Gap Fund* (VGF) dan *Availability Payment*. Kelengkapan yang khusus menangani pembangunan infrastruktur melalui skema KPS belum terstruktur/tersedia. Semua penanganan KPS masih bersifat *ad-hoc*, belum terlembaga baik di pusat maupun di daerah. Aturan dan pedoman yang lebih rinci dan secara sektoral sebagai acuan pelaksanaan proyek - proyek KPS belum tersedia. Contohnya mekanisme dan prosedur KPS sektor kesehatan, pendidikan,

perumahan, dan pariwisata. Terbatasnya tenaga ahli lokal yang kompeten untuk membantu penyiapan dan transaksi proyek KPS. Belum tersedianya pembiayaan pasar lokal (*domestic financing*) untuk pembiayaan proyek - proyek infrastruktur dari KPS.

1. Kerjasama Ekonomi Internasional

Sebagai negara berpenghasilan menengah (*Middle Income Country*), Indonesia secara bertahap harus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak terjebak pada posisi *Middle Income Trap* (MIT) sehingga keinginan menjadi salah satu negara terkuat di bidang ekonomi dapat terwujud dimasa yang akan datang. Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi internasional secara lebih luas baik dalam skema *Free Trade Agreement* (FTA) maupun *partnership* yang saat ini cukup banyak menjamur. Disadari bahwa *mindset* FTA bagi kebanyakan masyarakat Indonesia adalah negatif dan dianggap sebagai suatu ancaman, hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar, Indonesia dapat memilih skema-skema FTA yang dianggap tepat dan dapat menguntungkan Indonesia. Jadikan FTA sebagai peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk memperluas pergaulan global dan mengambil manfaat ekonomi yang seluas-luasnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin global tersebut, Indonesia tidak perlu khawatir karena Indonesia memiliki potensi yang besar antara lain memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan total PDB yang cukup tinggi serta satu satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G 20. Disamping itu, jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia merupakan negara nomor 4 terbesar di dunia setelah China (1), India (2), dan Amerika Serikat (3). Dengan jumlah penduduk sebesar 248.818.100 jiwa, luas wilayah 1.860.360 km dan GDP 862.567.900 sudah selayaknya Indonesia mampu menjadi pemain di pasar global sekaligus menjadi pemenang di pasar ASEAN. Potensi Indonesia tersebut masih diopang dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang melimpah dan Sumber Daya Manusia yang potensial dengan usia produktif.

Dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, tentunya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian.Kelemahan utama Indonesia adalah terletak pada sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah serta pola pikir masyarakat dan pelaku usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi ekonomi ASEAN. Untuk itu, diperlukan langkah langkah yang tepat dan berbagai kebijakan dan perbaikan regulasi yang mendukung

program-program penguatan di bidang-bidang yang strategis. Disamping itu, sinergitas antar Kementerian dan Lembaga terkait perlu dioptimalisasikan sehingga perumusan dan strategi yang dibuat sebagai modal untuk terjun di pasar global dapat memperkuat posisi lawar Indonesia dalam berbagai perundingan di pasar internasional.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam Buku I RPJMN 2015 -2019 serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima Tahun kedepan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang ekonomi dapat dicapai dengan optimal, maka Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

2.1 VISI

"Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan"

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni "***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan konpoucu organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan *responsibility* yang disingkat dengan "PIKIR". Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima Tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, penikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanananya pada setiap pusat pusat pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

2.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan, adalah sebagai berikut:

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan dalam mengupayakan/memastikan misi Presiden antara lain ***“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”***, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

2.3 TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan adalah:

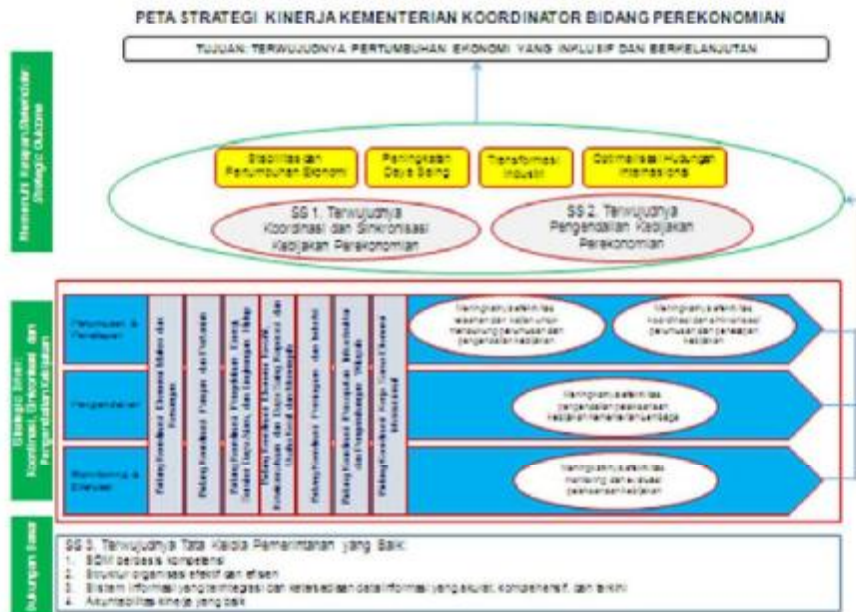
1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektordi bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan dibidang perekonomian yang berwawasan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran kedaulatan pangan, target sasaran kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air. Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan (periode 2015-2019).

Berdasarkan visi, misi, tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut di atas, sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan (periode 2015-2019) dapat dilihat pada peta strategi (*strategy map*) organisasi. Visi, misi, tujuan, sasaran yang dituangkan dalam peta strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2015-2019, sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mewujudkan tujuan 1 terkait dengan **“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, akan ditunjukkan dengan dan sasaran strategis 1 dan 2 sedangkan sasaran strategis 3 merupakan bagian dalam rangka mendukung terlaksananya kinerja fungsikementerian dan jajaran dibawahnya, diperlukan kelengkapan kelembagaan yang berfungsi untuk mengelola organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam hal penyediaan sarana, prasarana, SDM yang memadai guna menciptakan suasana kerja yang kondusif. Sasaran strategis 3 ini untuk mewujudkan tujuan 2 yang berkenaan dengan **“Terwujudnya kinerja**

organisasi yang baik ⁴. Untuk mengukur keberhasilan sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator	Target					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<p>Sasaran Strategis (Outcome) 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • %tase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi 	100	100	100	100	100	100
<p>Sasaran Strategis (Outcome) 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • %tase revisi kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi 	100	100	100	100	100	100
<p>Sasaran Strategis (Outcome) 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kinerja Manajemen Kementerian 	4	4	4	4	4	4

Keberhasilan tercapainya Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian dengan target 4 tersebut, yang perhitungannya bersumber dari rata-rata nilai hasil evaluasi yaitu laporan kenangan dengan bobot 25%, laporan LAKIP dengan bobot 20%, indeks kesehatan organisasi bobot 30%, %tasi pejabat yang memenuhi kompetensi 25%.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam upaya percepatan pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang berlandaskan di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta kepribadian dalam budaya maka kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan nama **"NAWA CITA"**. Sesuai dengan fungsi yang diamanatkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan lebih fokus memastikan terwujudnya pelaksanaan agenda prioritas 3, 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

NAWACITA - 3 Agenda Prioritas di Bidang Ekonomi

Akan membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa di kerangka Negara Kesatuan	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
1. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.	1. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, 2. Membangun transportasi untuk masalah perkotaan, 3. Membangun perumahan dan kawasan permukiman, 4. Peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur, 5. Penguatan investasi, 6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan, 7. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, 8. Akselerasi pertumbuhan	1. Peningkatan kedaulatan pangan, 2. Kelautan air, 3. Kedaulatan energi, 4. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, 5. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, 6. Penguatan sektor keuangan, 7. Penguatan kapasitas fiskal bangsa

	ekonomi nasional,
9.	Pengembangan kapasitas Peraturan Daerah/Provinsi nasional,
10.	Peningkatan daya saing tenaga kerja

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional maupun program program prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dengan melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/teknis dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target target sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. Adapun kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat;
2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi;
3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Perikanan;
4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas);
6. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Peraturan Daerah/Provinsi;
7. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi;
8. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;
9. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;
10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor;
11. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC);
13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.

Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perekonomian, adalah sebagai berikut:

1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam Nawacita;
2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keputusan dalam koordinasi dan sinkronisasi;
3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati antar Kementerian/Lembaga.

Sebagai upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka program kerja diturunkan pada program lintas sektor sebagai berikut:

- 1) Program Lintas Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
 - a) Membangun penguatan keuangan berbasis nasional;
 - b) Penguatan investasi sumber domestik melalui kebijakan keuangan;
 - c) Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
- 2) Program Lintas Kerja Koordinasi Pangan dan Pertanian
 - a) Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan;
 - b) Pengembangan komoditi orientasi ekspor;
 - c) Koordinasi ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian;
 - d) Penanggulangan Kemiskinan Petani.
- 3) Program Lintas Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - a) Peningkatan Produktivitas Energi dan Percepatan Infrastruktur Energi;
 - b) Peningkatan Tata Kelola Industri Ekstraktif;
 - c) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Lingkungan hidup.
- 4) Program Lintas Koordinasi Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM serta Ketenagakerjaan.
 - a) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
 - b) Penciptaan winausaha baru berbasis teknologi ;
 - c) Peningkatan daya saing Koperasi dan UKM;
 - d) Penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, pemberdayaan buruh, dan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi AEC 2015.
- 5) Program Lintas Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri
 - a) Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional;
 - b) Peningkatan Konektivitas Nasional;
 - c) Pengembangan Pasar Tradisional;
 - d) Pengembangan Investasi;
 - e) Pengembangan Sektor Industri dan Kawasan Industri.
- 6) Program Lintas Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a) Penyediaan infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;

- b) Penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomis;
 - c) Pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur.
- 7) Program Lintas Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
- a) Kerjasama Ekonomi Bilateral;
 - b) Kerjasama Ekonomi Multilateral ;
 - c) Kerjasama Ekonomi Regional.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Nasional/Kementerian guna mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik dalam jangka menengah/pendek, akan dilaksanakan dengan menggunakan dua Program yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

a. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

Program koordinasi kebijakan bidang perekonomian ini merupakan kumpulan dari kegiatan unit eselon II pada unit kerja eselon I, yang terdiri dari sasaran kinerja, target kinerja, pendanaan dan indikator kinerja. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional/Kementerian dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Unit kerja eselon I sesuai tugas dan fungsinya akan menetapkan keluaran-keluaran, antara lain berupa koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program kerja/kegiatan lintas sektor/sektor serta meningkatkan pemahaman/penguangan kepentingan (sosialisasi kebijakan). Keluaran-keluaran ini diyakini akan dapat mengupayakan meningkatnya pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/lintas secara efektif dan efisien bagi kementerian/lembaga yang dikoordinasikan (sebagai pelanggan). Keberhasilan kinerja unit kerja eselon I yang berupa sasaran program yang disebut juga hasil (*outcome*) akan diukur dengan indikator kinerja. Adapun kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh unit eselon I, adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Program (Outcome) I Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan						U1
Indikator:						
• %tase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan	80%	80%	85%	85%	90%	

Sasaran Program (Outcome) 2						
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 						
Indikator						11
<ul style="list-style-type: none"> • %lase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 	80%	80%	85%	85%	90%	
Sasaran Program (Outcome) 3						
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 						
Indikator						
<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya target pengaluran kredit berjaminan Kredit Usaha Rakyat/KUR (dalam rupiah) 	20 T	25 T	30 T	35 T	40 T	
Sasaran Program (Outcome) 4						12
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian 						
Indikator						
<ul style="list-style-type: none"> • %lase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang dilaksanakan 	100	100	100	100	100	
Sasaran Program (Outcome) 5						
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian 						
Indikator						
<ul style="list-style-type: none"> • %lase Kejelasan Bidang Pangan dan Pertanian yang terimplementasi 	100	100	100	100	100	
Sasaran Program (Outcome) 6						
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik 						
Indikator						
<ul style="list-style-type: none"> • %lase partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian 	90	90	90	90	90	

<p>Sasaran Program (Outcome) 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selase penangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan. 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>F3</p> <p>D3</p>
<p>Sasaran Program (Outcome) 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selase Kebijakan Bidang Pengalihan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi. 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
<p>Sasaran Program (Outcome) 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI. 	<p>90</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>	
<p>Sasaran Program (Outcome) 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selase perumusan penanganan peraturan di Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketercapaian ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan. 	<p>85</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>F4</p>

<p>Sasaran Program (Outcome) 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 		
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • %Lase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan 	85 85 85 85	85
<p>Sasaran Program (Outcome) 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. 		
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • %Lase pemerintah mendukung perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung pemerintah daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015. 	85 85 85 85	85
<p>Sasaran Program (Outcome) 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 6 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (<i>engineering services, architectural, accountancy services</i>) dalam pelaksanaan MEA 2015. 		
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • %Lase kecapakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk memajukan daya saing dan <i>market share</i> di ASEAN 	85 85 85 85	85
<p>Sasaran Program (Outcome) 14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 		85

Perniagaan dan Industri						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Mutu pelayanan pemerintah bidang perniagaan dan industri yang memuaskan. 	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 15						105
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Mutu pelayanan bidang perniagaan dan industri yang terimplementasi. 	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 16						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Mutu kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi 	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 17						106
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Indeks Efektifitas Koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah 	4	4	4	4	4	
Sasaran Program (Outcome) 18						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Mutu rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan. 	80	80	80	80	85	
Sasaran Program (Outcome) 19						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi 						

baru di luar pulau Jawa					
Indikator:					
• Jumlah Noprasan strategis elementer baru (J&K, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa	4	3	7	3	3
Sasaran Program (Outcome) 20					
• Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang dnanutkan					
Indikator:					
• Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang diempikan ke-dite ncepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KIP-CATURAN PEMERINTAH)	6	7	10	12	13
Sasaran Program (Outcome) 21					
• Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional.					
Indikator					
• %lase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan	80	80	85	80	80
• Prosentase (%) raka-mendai penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MFA.	75	75	75	75	75
Sasaran Program (Outcome) 22					
• Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional.					
Indikator					
• %lase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti	80	80	85	80	80
• %lase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti.	85	85	85	85	85
Sasaran Program (Outcome) 23					
• Terwujudnya Pemahaman Peserta atau Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Internasional.					

Indikator					
<ul style="list-style-type: none"> • %lase (%) pendanaan peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional 	85	85	85	85	85

- ii. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan teknis melalui peningkatan pelayanan unit kerja dan memantapkan penyelenggaraan organisasi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berkomitmen yang tinggi maupun pengendalian dan pengawasan yang kuat. Program ini merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran program. Kinerja program/kegiatan ini akan diukur dengan indikator kinerja. Adapun kinerja program/kegiatan yang berupa hasil/keluaran dan indikator kinerja serta targetnya adalah sebagai berikut:

Sasaran Program Indikator kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Program (Outcome)1 <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya budaya kerja organisasi berbasis kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik 						Setra/Enko
Indikator <ul style="list-style-type: none"> • %lase kepatuhan terhadap ketentuan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan 	90	90	90	90	90	
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan layanan eseksekutif dan pegawai 	3	3	3	3	3	
<ul style="list-style-type: none"> • %lase dan penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 	80	90	90	90	90	
<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi aparatur keuangan tetap/wajar tanpa pengendalian 	100	100	100	100	100	
<ul style="list-style-type: none"> • %lase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi 	75	90	90	90	90	
Sasaran Program (Outcome)2 <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai 						

Susunan Program Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2013	2016	2017	2018	2019	
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> • Sifat dan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai 	100	100	100	100	100	

3.3 Kerangka Regulasi

Percapaian dan perluasan pembangunan ekonomi memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha. Selain reformasi regulasi, pembangunan ekonomi tergantung pada pengembangan birokrasi yang lebih efektif yang didukung oleh kementerian lembaga yang kokoh. Negara memiliki peranan utama dalam memfasilitasi kesuksesan model kerjasama pemerintah dan swasta, menghapus rintangan regulasi dan administrasi dalam pembentukan sektor baru dan memfasilitasi keikutsertaan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang ada dalam ekonomi formal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersifat sebagai koordinator dalam penyusunan regulasi untuk menghindari tumpang tindihnya regulasi yang ditetapkan oleh sektor dan memastikan kebijakan yang telah diputuskan diakomodir dalam suatu regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangkaantisipasi penyesuaian terhadap perubahan lingkungan organisasi yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka setiap organisasi khususnya birokrasi pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengelolaan sumber daya organisasi harus dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mewujudkan:

- 1). Organisasi yang bersih dan akuntabel;
- 2). Peningkatan efektifitas koordinasi ;
- 3). Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Permasalahan dan tantangan di bidang perekonomian nasional yang kompleks saat ini dapat ditangani dengan lebih baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah yang terkait mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian

yang diselenggarakan oleh satu kementerian institusi kementerian koordinator dalam jajaran pemerintah atau kabinet. Dalam hal inilah peran penting tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menunjukkan besarnya kepercayaan instansi pemangku kepentingan /*stakeholders* atas peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lembaga koordinasi yang strategis dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di bidang perekonomian. Peran ini merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan stabilitas dan kondisi membaiknya perekonomian Indonesia. Keberhasilan menciptakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian yang harmonis, diwujudkan dalam kegiatan penting yang sering dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu melalui rapat-rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kalangan dunia usaha terkait.

Dalam menghadapi situasi permasalahan di bidang perekonomian nasional yang senantiasa berkembang dan cepat berubah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituntut untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah lintas kementerian/lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat segera dikelola dengan baik.

Organisasi yang mampu bertahan di masa depan adalah organisasi yang melakukan proses pembelajaran (*learning*) dengan baik. Dalam proses pembelajaran organisasi perlu mengevaluasi berbagai aspek dalam kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu meningkatkan kapasitas kinerja sumber daya manusia aparatur sesuai dengan nilai-nilai kementerian.

Dalam rangka implementasi nilai-nilai kementerian, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai-nilai kementerian yang dirumuskan terdiri dari 5 (lima) nilai dasar yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan *Responsibility* (PIKIR). Nilai-nilai Kementerian akan terus menjadi landasan bertindak dan pemicu dalam upaya peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya organisasi. Dengan implementasi nilai-nilai

kementerian akan menjadi dasar perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*).

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam menjalankan tugas operasional organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi akan dapat berjalan dengan lancar, bila mendapat dukungan sarana dan prasarana sebagai infrastruktur kerja yang memadai.

Penataan organisasi dan tata kerja yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015. Terdapat perubahan mendasar di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 dalam hal tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

- a. Pasal 2, disebutkan bahwa: "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian".
- b. Pasal 3, huruf b. "pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian"

Dalam rangka membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi organisasi sesuai perubahan lingkungan strategis agar diperoleh keseimbangan beban kerja yang proporsional antara tugas dan fungsi, jabatan struktural dan *output* yang dihasilkan. Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) diperlukan sebagai masukan untuk evaluasi dan penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Dengan berpondoran pada nilai kementerian "profesional", maka kegiatan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai dengan yang telah terimplementasi yaitu kebijakan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Struktural Eselon I, dan ditembak pada Jabatan Struktural Eselon II. Sedangkan promosi jabatan terbuka Eselon III dan Eselon IV telah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan para pejabat yang lebih profesional.

Terkait dengan penataan tata laksana dilakukan melalui kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembangunan atau pengembangan *e-government*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam SOP. Perilaku yang berkembang menunjukkan bahwa orang bekerja sudah mulai menggunakan SOP sebagai acuan dan melakukan audit SOP karena temuan-temuan yang tidak cocok dengan SOP-nya. Dari aspek pengembangan *e-government*, inovasi dan dukungan sistem informasi selalu terus dikembangkan dan infrastruktur informasi yang ada telah cukup memadai. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan yaitu melalui upaya pengembangan *e-government*, antara lain berupa *dashboard* sistem informasi perekonomian, intranet, website, sistem informasi kepegawasaan, sistem informasi pinjanaan luar negeri, aplikasi persuratan yang terintegrasi dengan aplikasi arsip ANRI.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan tata laksana kedepan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses bisnis;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses bisnis;
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*; dan
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan tugas dan fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan pendekatan peningkatan pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/linas sektor secara efektif dan efisien. Melalui peningkatan pengelolaan tersebut target sasaran kinerja

sektor/lintas sektor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dapat dicapai. Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diwujudkan dari sasaran strategis yang disebut juga dengan nama *outcome* kementerian (dampak). Kinerja dampak (*outcome*) kementerian merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja – kinerja program unit eselon I (hasil/*Outcome*) yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang ekonomi secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi rekomendasi yang disampaikan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada kementerian/lembaga di bidang ekonomi, sehingga memacu aktivitas kementerian/lembaga tersebut, yang pada akhirnya mendorong/peningkatan produktivitas di sektor/lintas sektor. Oleh karena itu, keluaran (rekomendasi) yang ditetapkan unit eselon I tersebut merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah keluaran maupun jenis keluarannya. Untuk mewujudkan keluaran (*output*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran. Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dengan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Dalam pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, *outcome*, *output* hingga komponen. Perhitungan prediksi berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 1 Tahun kedepan (*base line budget*) dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan Tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya. Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran Tahunan yang bersifat indikatif. Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 pada Matriks Pendanaan dan Target.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) Tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijalankan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan Tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan harapan dapat mendukung secara optimal terhadap upaya pencapaian rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir Tahun anggaran. Apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan.

Dengan tersusunnya Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memaksimalkan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

LAMPUKAN II
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
 KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN
 2015-2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program/kegiatan Sasaran Program/sasaran kegiatan Indikator kinerja	Target					Alokasi dalam juta rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kemampuan/Lembaga:						320.584,5	351.514,9	342.680,0	375.012,0	424.011,5	
Sasaran Strategis (S) menurut 1: <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perencanaan 											Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan Kerangka
Indikator: <ul style="list-style-type: none"> Tersebabnya kegiatan baru bidang perencanaan yang terwujud/realisasi 	100	100	100	100	100						
Sasaran Strategis (S) menurut 2: <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian 											Kemendko

<p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersempainya target kredibilitas kinerja/penilaian Kredit Usaha Rakyat/KUR (dalam rupiah) Sasaran Program <i>Component 4:</i> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kelangkaan pangan dan pertanian 	<p>target kredibilitas kinerja/penilaian Kredit Usaha Rakyat/KUR (dalam rupiah)</p>	20 T	25 T	30T	35 T	40 T														101	
<p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porsi/risiko hasil rekonsolidasi koordinasi dan sinkronisasi keb, akan pangan dan pertanian yang diselesaikan 	<p>hasil rekonsolidasi koordinasi dan sinkronisasi keb, akan pangan dan pertanian yang diselesaikan</p>	100	100	100	100	100															101
<p><u>Sasaran Program 'Component 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porsi/risiko keberhasilan Bidang Pangan dan Pertanian yang terwujud/realisasi 	<p>keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian</p>	100	100	100	100	100															101
<p><u>Sasaran Program 'Component 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porsi/risiko partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian <p><u>Sasaran Program 'Component 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi ketajaman pengelakan energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	<p>efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik</p>	90	90	90	90	90															101

<p><u>Indikator:</u></p> <p>➤ Persentase rampungan pelaksanaan perundang-undangan di bidang penguasaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan</p>	100	100	100	100	100													C10
<p><u>Sasaran Program 'Oleceas' 8:</u></p> <p>♦ Terwujudnya peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>➤ Persentase keefektifan Mencegah Penyelalaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi</p>	100	100	100	100	100													C10
<p><u>Sasaran Program 'Oleceas' 9:</u></p> <p>• Meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan terhadap keefektifan dan Exractive Industries Transparency Initiative (EITI)</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>➤ Persentase pemahaman pemangku kebijakan EITI terhadap kebijakan atau EITI</p>	90	90	90	90	90													D.V
<p><u>Sasaran Program 'Oleceas' 10:</u></p> <p>• Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi serta urusan kelengkapan Ekonomi Kreatif, Inovasi dan Daya Saing Keperasi dan Usaha Kori dari Masyarakat</p>																		

<p>Indikator: ➤ Persentase pertumbuhan anggaran: peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kreativitas dan Daya Saing KUKM, serta SUDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diwujudkan:</p>	85	85	85	85	85			13.V
<p>Sasaran Program 'Ekonomi 11' • Terwujudnya penggerak-penggerak ekonomi kreatif, kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SUDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terwujud dan diwujudkan</p> <p>Indikator: ➤ Persentase keajaiban bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SUDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terwujud dan diwujudkan</p> <p>Sasaran Program 'Ekonomi 12': • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SUDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MERA 2015.</p>	85	85	85	85	85			13.V

<p>Indikator:</p> <p>➤ Persentase pertumbuhan investasi, peraturan, kebijakan Ekamerta Kreatif-Kasional yang mendukung pertumbuhan daya saing SGM, kementerian luar/buruh, dan KJKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.</p>	85	85	85	85	85	<p>DAV</p>
<p>Sasaran Program (Output) 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan & MEA yang sesuai dengan pertumbuhan Ekamerta Kreatif-Kasional melalui <i>Masterplan Regulating, services, architecture, accountability</i> selesai dalam pelaksanaan MEA 2015. <p>Indikator:</p> <p>➤ Terselase kebijakan serdikasi uji komposisi nasional/internasional terhadap SGM, kementerian luar/buruh, dan perusahaan UMKM serta produk ekspor baru kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN</p>	85	85	85	85	85	
<p>Sasaran Program (Output) 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perindustri dan Industri 						

<p>Sasaran Program 'Outcome' 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendahan kelangkaan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase rekomendasi ket. akan dipercepat, pemanfaatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dilimp. emertasiakan 	80	80	80	80	80													DVI
<p>Sasaran Program 'Outcome' 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK) Kawasan Industri di luar pulau Jawa <p>Sasaran Program 'Outcome' 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercepatnya penataan prasyak infrastruktur prioritas yang diusulkan 	4	3	7	2	3													DVI
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas (KIP111) <p>Sasaran Program 'Outcome' 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Saja Sama Ekonomi Transnasional 	6	7	10	12	15													DVI

<p><u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepahaman kerja sama ekonomi internasional yang dilaksanakan</p>	85	85	85	85	85													
<p>➤ Persentase (%) rekomendasi penguat daya saing nasional dalam rangka mendorong komitmen Indonesia dalam: MBA, Sasaran Program <u>Outcomes 22:</u> • Terwujudnya Penguatan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Internasional, Internasional, Indikator: ➤ Persentase (%) kesepahaman kerja sama ekonomi internasional yang dilaksanakan</p>	85	85	85	85	85													TWT
<p>➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang dilaksanakan, Sasaran Program <u>Outcomes 23:</u> • Terwujudnya Pemahaman Bersama atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Terjessama Ekonomi Internasional, Indikator: ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-Hasil kerjasama ekonomi internasional</p>	85	85	85	85	85													TWT

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase hasil rekonstruksi pembangunan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kebijakan renibasi, peninjauan dan evaluasi TBT yang ditandatangani yang diundukduduki</p> <p>2. Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal</p>	80	80	80	80	80	2.000	2.300	2.415	2.537	2.660	Askep Fiskal
<p><u>Sasaran kegiatan (output)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekonstruksi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal 											
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekonstruksi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditundukduduki</p> <p>Sasaran kegiatan (output)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekonstruksi pembangunan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase hasil rekonstruksi pembangunan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal yang ditundukduduki</p> <p>Sasaran kegiatan (output)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekonstruksi pembangunan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal 	85	80	80	80	80						
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase hasil cukurungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi</p>	80	80	80	80	80						

3. Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN		2.000	2.600	2.100	2.205	2.315	Asdep BUMN
<p><u>Sasaran kegiatan (output) 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN 							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang ditindaklanjuti 	85	80	80	80	80		
<p><u>Sasaran kegiatan (output) 2</u></p> <p>Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN</p>							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti <p>4. <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Tenaga Keuangan</u></p>	75	70	80	70	80		Asdep Pasar Modal dan Tenaga Keuangan
<p><u>Sasaran kegiatan (output) 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK 							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang ditindaklanjuti 	85	80	80	80	80		

<p>Sasaran kegiatan lanjutan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan dan kebijakan yang terkait dengan bidang PVLK <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang PVLK yang ditindaklanjuti 	85	80	80	80	80	80	80	80	80	
<p>Sasaran kegiatan lanjutan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan dan anggaran usaha mikro dan kecil <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase hasil rekomendasi kebijakan ZIR mikro 5. Koalisi Kerjasama <u>11 dan 12</u> dan <u>12 dan 13</u> dan <u>13 dan 14</u> dan <u>14 dan 15</u> dan <u>15 dan 16</u> dan <u>16 dan 17</u> dan <u>17 dan 18</u> dan <u>18 dan 19</u> dan <u>19 dan 20</u> dan <u>20 dan 21</u> dan <u>21 dan 22</u> dan <u>22 dan 23</u> dan <u>23 dan 24</u> dan <u>24 dan 25</u> dan <u>25 dan 26</u> dan <u>26 dan 27</u> dan <u>27 dan 28</u> dan <u>28 dan 29</u> dan <u>29 dan 30</u> dan <u>30 dan 31</u> dan <u>31 dan 32</u> dan <u>32 dan 33</u> dan <u>33 dan 34</u> dan <u>34 dan 35</u> dan <u>35 dan 36</u> dan <u>36 dan 37</u> dan <u>37 dan 38</u> dan <u>38 dan 39</u> dan <u>39 dan 40</u> dan <u>40 dan 41</u> dan <u>41 dan 42</u> dan <u>42 dan 43</u> dan <u>43 dan 44</u> dan <u>44 dan 45</u> dan <u>45 dan 46</u> dan <u>46 dan 47</u> dan <u>47 dan 48</u> dan <u>48 dan 49</u> dan <u>49 dan 50</u> dan <u>50 dan 51</u> dan <u>51 dan 52</u> dan <u>52 dan 53</u> dan <u>53 dan 54</u> dan <u>54 dan 55</u> dan <u>55 dan 56</u> dan <u>56 dan 57</u> dan <u>57 dan 58</u> dan <u>58 dan 59</u> dan <u>59 dan 60</u> dan <u>60 dan 61</u> dan <u>61 dan 62</u> dan <u>62 dan 63</u> dan <u>63 dan 64</u> dan <u>64 dan 65</u> dan <u>65 dan 66</u> dan <u>66 dan 67</u> dan <u>67 dan 68</u> dan <u>68 dan 69</u> dan <u>69 dan 70</u> dan <u>70 dan 71</u> dan <u>71 dan 72</u> dan <u>72 dan 73</u> dan <u>73 dan 74</u> dan <u>74 dan 75</u> dan <u>75 dan 76</u> dan <u>76 dan 77</u> dan <u>77 dan 78</u> dan <u>78 dan 79</u> dan <u>79 dan 80</u> dan <u>80 dan 81</u> dan <u>81 dan 82</u> dan <u>82 dan 83</u> dan <u>83 dan 84</u> dan <u>84 dan 85</u> dan <u>85 dan 86</u> dan <u>86 dan 87</u> dan <u>87 dan 88</u> dan <u>88 dan 89</u> dan <u>89 dan 90</u> dan <u>90 dan 91</u> dan <u>91 dan 92</u> dan <u>92 dan 93</u> dan <u>93 dan 94</u> dan <u>94 dan 95</u> dan <u>95 dan 96</u> dan <u>96 dan 97</u> dan <u>97 dan 98</u> dan <u>98 dan 99</u> dan <u>99 dan 100</u> 	70	70	80	80	80	80	80	80	80	Askep Pengembangan 1) Ekonomi Daerah dan Sektor MSU
<p>Sasaran kegiatan lanjutan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil yang dilaksanakan <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil yang dilaksanakan <p>Sasaran kegiatan lanjutan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bidang PVLK 	90	80	80	80	80	80	80	80	80	

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah.</p>	80	90	80	90	80													
<p>6. Koordinasi Kabupaten <u>Parakan INI</u></p>						2.700	2.900	3.000										Asdarp Bangun
<p><u>Sasaran kegiatan Lemery 1</u></p> <p>• Terwujudnya kerjasama koordinasi dan sinkronisasi kebh. akan pangan</p> <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Tersentase hasil rekonsolidasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan yang diselesaikan.</p> <p><u>Sasaran kegiatan Lemery 2</u></p> <p>• Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebh. akan pangan.</p>	85	100	100	100	100													
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase ke dijabkan bidang pangan yang terkumpul dan diserahkan</p> <p><u>Sasaran kegiatan Lemery 3</u></p> <p>• Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian</p> <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan</p>	85	100	100	100	100													

<p>Sasaran kegiatan indikator 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penguatan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perbaikan 																	
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase kejelasan biaya pelaksanaan dan perbaikan yang terimplementasikan 	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<p>9. Keefektifan pelaksanaan bidang pembangunan sarana prasarana, sarana pangan, dan sumber daya manusia</p>																	
<p>Sasaran kegiatan indikator 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengujian koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sarana, sarana pangan dan pertanian yang dilaksanakan 																	
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase hasil rekrutasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sarana, sarana pangan dan pertanian yang dilaksanakan 	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<p>10. Koordinasi Kebijakan Pajang Tala Kelola</p> <p><u>Keluaran:</u></p> <p>Sasaran kegiatan <u>Indikator 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Tala Kelola Kabupaten <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Tala Kelola Kabupaten yang ditunjukkan: 	<p>85</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Sasaran kegiatan <u>Indikator 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penguatan pelaksanaan kegiatan kerjasama pascapanen, serapan pascapanen dan pendidikan <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Tala Kelola Kabupaten 	<p>85</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>1. Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi</p>	<p>2.500</p>	<p>3.600</p>	<p>3.780</p>	<p>3.970</p>	<p>4.170</p>	<p>Sasaran kegiatan <u>Indikator 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Produktifitas Energi <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase rekomendasi kebijakan di bidang produktifitas energi yang ditunjukkan: <p>Sasaran kegiatan <u>Indikator 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang produktifitas energi 	<p>75</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Asdep Provinsi Indregi</p>
---	-----------	------------	------------	------------	------------	---	-----------	------------	------------	------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------------------------------

<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pelaksanaan di bidang P. Produktivitas Energi</p> <p>Sasaran kegiatan (output) 3</p> <p>• Terwujudnya Layanan Dukungan Administrasi kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Pergerakan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup</p>	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<p>Indikator</p> <p>➤ Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Pergerakan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup</p> <p>2. <u>Kuantitas Kelijaksanaan Bidang Industri Ekstraktif</u></p>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Industri ekstraktif yang terimplementasi</p>	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <p>• Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang Industri Ekstraktif</p>																	

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang industri eksportatif</p> <p>Sasaran kegiatan (output) 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan terpadu keajaiban dari exclusive Indonesia • Transparansi Initiative (TMI) 	75	100	100	100	100											Asdep Kelestarian Lingkungan Hidup
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase pembaruan pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru LPTN</p>	-	90	90	90	90											
<p>1.3. Koordinasi Kebijakan Bidang Pelaksanaan Anggaran Hidup</p> <p>Sasaran kegiatan (output)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kerangka kebijakan bidang pelaksanaan Anggaran Hidup 						2.000	2.200	2.340	2.380	2.709						
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi kebijakan bidang pelaksanaan yang terimplementasi</p>	75	80	90	90	80											
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penguasaan kebijakan bidang pelaksanaan Anggaran Hidup 																
<p>➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelaksanaan anggaran hidup</p>	75	100	100	100	100											

<p>16. <u>Peningkatan koordinasi</u> <u>kegiatan lintas</u> <u>Infrastruktur Energi</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan</u> <u>target 1</u> Tercapainya koordinasi kegiatan bidang Infrastruktur Energi</p> <p><u>Indikator</u> • Persentase rekomendasi kegiatan di bidang infrastruktur energi yang terimplementasi</p>	75	100	100	100	100	3.000	2.300	2.400	2.500	2.670	<p><u>Aspek</u> <u>Infrastruktur</u> <u>Energi</u></p>
<p><u>Sasaran kegiatan</u> <u>target 2</u> Tercapainya Pengendalian kegiatan bidang Infrastruktur Energi</p> <p><u>Indikator</u> • Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Infrastruktur Energi</p> <p>17. <u>Koordinasi kebijakan</u> <u>Bidang Agribisnis</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan</u> <u>target 1</u> • Tercapainya penyatuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan agribisnis</p> <p><u>Indikator</u> • Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan agribisnis yang dieleksekusi</p> <p><u>Sasaran kegiatan</u> <u>target 2</u> • Tercapainya pencapaian pelaksanaan kegiatan agribisnis</p>	75	100	100	100	100	2.800	2.100	2.200	2.300	2.400	

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase kejadian bidang agribisnis yang memenuhi pelaksanaan</p> <p>17. <u>Kontribusi Kehutanan</u> <u>Bidang Perikanan, Daya Saling Koperasi dan</u> <u>DMKM</u></p>	75	100	100	100	100	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	<p>Askep Peningkatan Daya Saling Koperasi dan DMKM</p>
<p><u>Sasaran kegiatan (output)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pengkalan Daya Saling Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pengkalan Daya Saling Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dihasilkan</p>	85	85	85	85	85						
<p><u>Sasaran kegiatan (output) 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penguatan pelaksanaan kegiatan Pengkalan Daya Saling Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi penguatan pelaksanaan kegiatan Pengkalan Daya Saling Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DMKM)</p>	90	90	90	90	90						

<p>18. <u>Koordinasi, Pengkajian, Penguatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan indikator 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinergisasi ke jilakan Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 																<p>Askep Pengembangan Ekonomi Kreatif</p>
<p><u>Sasaran kegiatan indikator 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif <p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Persentase rekomendasi yang diambil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif 	90	85	85	85	85	85										
<p><u>Sasaran kegiatan indikator 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Program dan Tindak lanjut administrasi pada Depati Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Koordinator, dan Daya Saing UKM yang optimal 																

<p><u>Indikator</u> ➤ Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan lain-lain kepada Pesisir Depont Bidang Koordinasi Ekonomi Keratif, Kelestarian, dan Daya Saing KURM</p>	12	12	12	12	12				Asdep Pengendalian Kewirausahaan
<p><u>Sasaran kegiatan tahunan</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan</p>									
<p><u>Indikator</u> ➤ Terselase rekomendasi kerajinan dan administrasi kerajinan Pengolahan Kewirausahaan yang diselesaikan</p>	85	85	85	85	85				
<p><u>Sasaran kegiatan tahunan 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kerajinan Pengembangan Kewirausahaan</p>									
<p><u>Indikator</u> ➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kerajinan Pengembangan Kewirausahaan</p>	85	85	85	85	85				Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kewirausahaan
<p>19. <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Penekatan Daya Saing Ekonomi Kewirausahaan</u></p>						2.000	2.000	2.100	2.200
									2.320

<p>Sasaran kegiatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kearifan Penugkalan Daya Saung Ekonomi Kawasan 																
<p>Sasaran kegiatan lainnya 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kearifan Penugkalan Daya Saung Ekonomi Kawasan 																
<p>Indikator</p> <p>↳ Persentase rekomendasi pelaksanaan pelaksanaan kearifan Penugkalan Daya Saung Ekonomi Kawasan</p>	85	85	85	85	85											
<p>20. Koordinasi kebijakan bidang ketenagakerjaan</p> <p>Sasaran kegiatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kearifan ketenagakerjaan 						2.000	2.000	2.100	2.200				2.320	Kronasakerjaan	Asdep	
<p>Indikator</p> <p>↳ Persentase koordinasi dan sinkronisasi kearifan ketenagakerjaan yang diselenggarakan</p>	85	85	85	85	85											

<p>Sasaran ke-4 tahun 2014/2015 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengkalan Daya Saring Ekonomi Kawasan 																	
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dan anggaran kinerja 	85	85	85	85	85												
<p>21. Koordinasi Pengeluaran dan Pencapaian sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW (N)</p>						3.000	2.500	2.750	3.025				3.328				Aspek Pengeluaran, Kinerja dan Realisasi Perdagangan Internasional
<p>Sasaran ke-5 tahun 2014/2015 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan Pengendalian Kebijakan dan Anggaran Sistem NSW dan Integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti 	80	100	100	100	100												

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ <u>Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan di Bidang Pengujian dan Penerapan Sistem MSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang dilakukan utl</u></p>	75	100	100	100	100				Asdep Peringkasan Daya Sains Kooperasi dan LMBM
<p>22. <u>Koordinasi Penerimaan Elemen-bidang Ekspansi UKM Berbasis Teknologi ITI</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan (Output) 1</u></p> <p>▪ Terwujudnya keard nasi dan sinkronisasi, kelengkapan, Penataan Kalendarium Pengambilan UKM Berbasis Teknologi</p> <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ <u>Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebid, akan, Penataan Kalendarium Pengambilan UKM Berbasis/ Teknologi yang diselesaikan</u></p>	80	85	85	85	85				
<p><u>Sasaran kegiatan (Output) 2</u></p> <p>• <u>Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebid akan Penataan Kalendarium Pengambilan UKM Berbasis Teknologi</u></p> <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ <u>Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebid akan bidang Penataan Kalendarium Pengambilan UKM Berbasis/ Teknologi</u></p>	75	85	85	85	85				

<p>23. <u>Suatu-tiap Kali</u> <u>Kelahiran</u> <u>Pengeluaran</u> <u>dan</u> <u>Legislatif</u> <u>Nasional</u></p> <p><u>Sasaran Kegiatan</u> <u>Indikator 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengendalian legislatif nasional 																<p>Aspek: Pengeluaran Legislatif Nasional</p>
<p><u>Indikator</u></p> <p>▶ Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kegiatan pengendalian legislatif nasional yang ditindaklanjuti</p> <p><u>Sasaran Kegiatan</u> <u>Indikator 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengendalian legislatif nasional 	80	100	100	100	100	100										
<p><u>Indikator</u></p> <p>▶ Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kegiatan pengendalian legislatif nasional yang ditindaklanjuti</p> <p><u>Sasaran Kegiatan</u> <u>Indikator 3</u></p> <p>Terwujudnya rekomendasi kegiatan pengendalian daya tarik legislatif nasional</p>	75	100	100	100	100	100										
<p><u>Indikator</u></p> <p>▶ Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian daya tarik legislatif nasional yang ditindaklanjuti</p>	100	100	100	100	100	100										

<p>24. <u>Suportansi Kelangkaan Bidang Perdagangan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan Internasional</u></p>		2.000	2.600	2.200	2.420	2.663	Askep Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan Internasional
<p><u>Sasaran kegiatan lainnya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan Perdagangan Internasional 							
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi kebijakan Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti</p>	80	100	100	100	100	100	
<p><u>Sasaran kegiatan lainnya 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Perdagangan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan Internasional 							
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Perdagangan dan Fasilitas Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti</p> <p><u>Sasaran kegiatan lainnya 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan peninjauan daya saing ekspor <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi kebijakan peninjauan daya saing ekspor yg ditindaklanjuti</p>	75	100	100	100	100	100	

<p>25. <u>Suatu</u> <u>Kelembagaan</u> <u>Pengelolaan</u> <u>Investasi</u></p>																<p>Aspek: Pengembangan Investasi</p>
<p>Sasaran kegiatan <u>Investasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan investasi 																
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditandatangani 	80	100	100	100	100											
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditandatangani 	75	100	100	100	100											
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditandatangani 	100	100	100	100	100											

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Jumlah layanan di lingkungan administrasi kegiatan dan lalu lintas pada Perputi Bidang Koperasi dan Koperasi dan Usaha Tani</p>	12	12	12	12	12						
<p>96. <u>Kemampuan Kelengkapan Bicara, Pengualan Pasar Tani Negeri dan Terbit Uraian</u></p>						2.000	2.000	2.200	2.421	2.662	Askep Kanguluan Pasar Uraian Negeri dan Terbit Uraian
<p><u>Sasaran kegiatan lainnya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang telah pasar dalam negeri dan terbit uraian yang dimaksud juga 											
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi kebijakan yang telah pasar dalam negeri dan terbit uraian yang dimaksud juga</p>	80	100	100	100	100						
<p><u>Sasaran kegiatan lainnya 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengendalian investasi 											
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti</p>	75	100	100	100	100						
<p><u>Sasaran kegiatan lainnya 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan daya saing pasar dalam negeri 											

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase Rekonstruksi keajaiban pertumbuhan daya saing pasar dalam negeri yang ditandatangani</p> <p>27. Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri</p> <p><u>Sasaran kegiatan (output) 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekonstruksi kebijakan pengembangan industri 	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Aspek: Pengembangan Industri
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekonstruksi keajaiban pertumbuhan industri yang ditandatangani</p> <p><u>Sasaran kegiatan (output) 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekonstruksi pelaksanaan pertumbuhan kebijakan pengembangan investasi 	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pertumbuhan keajaiban pengembangan industri yang ditandatangani</p> <p><u>Sasaran kegiatan (output) 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya rekonstruksi keajaiban pertumbuhan daya saing industri <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase Rekomendasi keajaiban pertumbuhan daya saing industri yang ditandatangani</p>	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

<p>28. <u>Kepuasan Berjinkukan Sistem Transportasi Multi Moda (NI)</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) rekomendasi kebijakan Sistem Transportasi Multi moda yang ditindaklanjuti. <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Sistem Transportasi Multimoda <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Sistem Transportasi Multimoda yang ditindaklanjuti. <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya Kontribusi Peserta Terhadap Monev Sosialisasi Kegiatan Sistem Transportasi Multimoda <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Pemahaman Peserta Terhadap Monev Sosialisasi Kegiatan Sistem Transportasi Multimoda <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sistem Transportasi Multimoda (MMDP) 	85	80	90	80	80	7.300	7.300	7.819	8.358	8.973	Askep Transportasi Multimoda
<p>29. <u>Kepuasan Berjinkukan Sistem Transportasi Multi Moda (NI)</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) rekomendasi kebijakan Sistem Transportasi Multi moda yang ditindaklanjuti. <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Sistem Transportasi Multimoda <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Sistem Transportasi Multimoda yang ditindaklanjuti. <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya Kontribusi Peserta Terhadap Monev Sosialisasi Kegiatan Sistem Transportasi Multimoda <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Pemahaman Peserta Terhadap Monev Sosialisasi Kegiatan Sistem Transportasi Multimoda <p><u>Sasaran kegiatan tercapai 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Sistem Transportasi Multimoda (MMDP) 	85	80	90	80	80	7.300	7.300	7.819	8.358	8.973	

<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dipakai yang digunakan sistem transportasi JABODETABEK</p> <p>Sasaran kegiatan (target) 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kelilingan Persempatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK yang diindependen 	85	90	80	80	80											
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan transportasi Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK yang diindependen</p>	85	80	90	80	80											
<p>30. Suatu jenis Kebijakan Perencanaan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi</p> <p>Sasaran kegiatan (target) 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi <p>Indikator</p> <p>➤ Jumlah rekomendasi kebijakan Perencanaan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi yang diterbitkan</p> <p>Sasaran kegiatan (target) 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi 	9	9	9	10	10											Aspek Perencanaan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
						5.400	5.400	5.600	5.800	6.000						

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Jumlah rekomendasi pengendalian pelaksanaan Kebijakan Pemataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi yang ditindaklanjuti</p> <p><u>Sasaran kegiatan meliputi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Pemahaman Peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Peraturan Izatag dan Kawasan Strategis Ekonomi 	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Peraturan Izatag dan Kawasan Strategis Ekonomi</p>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
<p>30</p> <p><u>Sasaran Kegiatan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia</u></p> <p><u>Sasaran kegiatan meliputi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Kebijakan Industri dan Kebijakan Daerah Jangka Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia <p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis yang ditindaklanjuti</p>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
<p>14.500</p> <p>13.000</p> <p>12.000</p> <p>11.000</p> <p>10.000</p> <p>9.000</p> <p>8.000</p> <p>7.000</p> <p>6.000</p> <p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>0</p>	14.500	13.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	0	0	
<p>Asdep Peraturan Kawasan Strategis Ekonomi</p>																	

<p>Sasaran kegiatan indikator 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengabdian Pelaksanaan Kebijakan Proyek-Proyek (RRI) 										
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengabdian Pelaksanaan Kebijakan Proyek – Proyek di seluruh dan kawasan Strategis yang diturunkan/ujut</p>										
80	80	80	80	80	80					
<p>Sasaran kegiatan indikator 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya Pemahaman Peserta terhadap uraian sosisi sasi kebijakan Perencanaan Ruang dan Kawasan Strategis 										
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap materi Sosialisasi/desimulasi Kebijakan Proyek – Proyek Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang dipromosikan</p>										
80	80	80	80	80	80					
<p>3.1 Koordinasi Kebijakan Binaan Infrastruktur Sumber Daya Air</p>										
<p>Sasaran kegiatan indikator 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pemetaan/penyusunan Infrastruktur Sumber Daya Air 										
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti</p>										
85	85	85	90	90	90					
						7.300	7.500	8.200	9.075	9.982
										Askep Infrastruktur Sumber Daya Air

<p>➤ Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Terpencil Pembangunan Terpencil Tawakal Negara Indonesia</p>	80	90	80	45	85	
<p><u>Sasaran Kegiatan (a/1) 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air 						
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Besar Tawakal</p>	80	90	80	55	85	
<p>➤ Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang diadakan yang diadakan</p>	85	90	90	95	95	
<p><u>Sasaran Kegiatan (a/1) 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan IWRG Indonesia-Bangsepura untuk pengendalian BBK (Bantuan-Motivasi-Kerjasama dan 22K (Kawacaci Eksekusi K1) asusi lainnya di Indonesia yang diadakan 						

<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ <u>Persentase (%) Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan IWC Indonesia-Singapura untuk pengalangan modal</u></p> <p>penyertaan yang FBK (Bulan-Bulan-Kantun) dan ZEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditandatangani</p>	80	90	80	85	85												
<p><u>Sasaran kegiatan/program 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Terwujudnya Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tama Jelajah pada Departemen dan Koordinator Percepatan Infrastruktur Darat</u> <u>Pengembangan Wilayah</u> 																	
<p><u>Indikator</u></p> <p>➤ <u>Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan lama kelola pada Departemen Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Darat</u> <p><u>Pengembangan Wilayah</u></p> <p>32 <u>Koordinasi Kebijakan</u></p> <p><u>Perumahan, Perumahan, dan Peningkatan</u></p> <p><u>Infrastruktur</u></p> </p>	12	12	12	12	12												
<p><u>Sasaran kegiatan/program 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Perumahan, Perumahan, & Pembangunan Infrastruktur</u> 						4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000						Aspek Perumahan, Perumahan, dan Pembangunan Infrastruktur

<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Peningkatan Kinerja Perumahan, Pemukiman dan Perumahan Infrastruktur yang ditindaklanjuti</p>	80	90	80	80	80				
<p>Sasaran Kegiatan (Output) 2</p> <p>• Tersaainya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Pemukiman, & Pembangunan Infrastruktur</p>									
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perumahan, Pemukiman dan Pembangunan Infrastruktur yang ditindaklanjuti</p> <p>Sasaran Kegiatan (Output) 3</p> <p>• Terwujudnya Pemukiman Berseri Berhadapan Masyarakat Sosial Kesejahteraan Perumahan, Pembangunan dan Pembangunan Infrastruktur</p>	80	80	80	80	80				
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pemukiman dan Pembangunan Infrastruktur</p>	80	90	80	80	80				
<p>25. <u>Kelembagaan</u> <u>kebijaksanaan</u> <u>penyediaan</u> <u>perumahan</u> <u>infrastruktur</u> <u>proritas</u></p>	50.406,5	48.284,6	55.000,0	65.000,0	80.000				Askep Perumahan, Pemukiman, dan Pembangunan Infrastruktur

<p>Sasaran keadilan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi Hasil Penelitian Ekonomi Terkini, Penyelidikan Infrastruktur Prioritas <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Rekomendasi Hasil Ketajukan Ekonomi Terkini, Penyelidikan Infrastruktur Prioritas yang diimplementasikan 																		
<p>Sasaran keadilan sosial 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pre PS / Revisi Pre PS Proyek Infrastruktur Prioritas <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pre PS / Revisi Pre PS Proyek Infrastruktur Prioritas yang diimplementasikan <p>Sasaran keadilan sosial 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelidikan Infrastruktur Prioritas <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase (%) Rekomendasi Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelidikan Infrastruktur Prioritas yang diimplementasikan <p>Sasaran keadilan sosial 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Peranuran Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Penyelidikan Infrastruktur Prioritas 	0	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Pemeliharaan Peserta Terhadapan Materi Sosialisasi Kegiatan Penyelidikan dan Rancangan Struktur Penelitian</p>	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Asdep Telentika dan Utilitas
<p>34 Koordinasi kabijakan bidang telentika dan utilitas</p> <p>Sasaran kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Telentika dan Utilitas 																		
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi kebijakan Telentika dan Utilitas yang ditindaklanjuti.</p> <p>Sasaran kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Telentika dan Utilitas 	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) Rekomendasi pengendalian pelaksanaan Kebijakan Telentika dan Utilitas yang ditindaklanjuti</p>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
<p>35 Koordinasi Kegiatannya Bidang Kearsifan dan Teknologi</p> <p>Sasaran kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kesepakatan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik 																		Asdep Kearsifan dan Teknologi Amerika dan Pasifik

<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) kesepaktarian kerja secara ekonomi Amerika dan Pasifik yang dilaksanakan</p> <p>Sasaran kegiatan (target) 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik 	85	90	80	80	80												
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) kesepaktarian kerja secara ekonomi Amerika dan Pasifik yang diwujudkan</p>	85	90	80	80	80												
<p>➤ Persentase (%) rekonstruksi hasil monitoring dan evaluasi kerja secara ekonomi Amerika dan Pasifik yang diwujudkan</p> <p>Sasaran kegiatan (target) 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Pemahaman Peserta atas materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik 	85	90	80	80	80												
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik</p> <p>36 Koordinasi Kebijakan Tingkat Kerjasama Ikonomi Jepang, Afrika dan Timor-Timor (1)</p>	85	90	80	80	80	2.700	2.400	2.850	3.400	3.900							Askep Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timor-Timor

<p>Sasaran kegiatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan 										
<p>Sasaran kegiatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya pengencalan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah 										
<p>Sasaran kegiatan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penanaman modal alias Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah 										
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersentase (%) kesepakanan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan 	85	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersentase (%) kesepakanan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditandatangani 	85	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersentase (%) penanaman modal atas motor sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah 	85	80	80	80	80	80	80	80	80	80

<p>37 <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional (MI)</u></p> <p>Sasaran kegiatan (output)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional 		2.570	2.200	2.435	2.670	3.000	Aspek Kinerja Ekonomi Regional dan Sub Regional
<p><u>Indikator</u></p> <p>↳ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terselesaikan</p>	85	85	85	85	85	85	
<p>↳ Persentase (%) rekomendasi penguatan Daya Saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA</p>	85	80	90	80	80	80	
<p><u>Sasaran kegiatan (output) 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rencanan Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional 							
<p><u>Indikator</u></p> <p>↳ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang dihidangkan</p>	85	85	85	85	85	85	
<p>↳ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang dihidangkan</p>	85	85	85	85	85	85	

<p>Sasaran kegiatan indikator 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Pemeliharaan Peserta atau Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sarana Ekonomi Regional dan Sub-Regional 										
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sarana ekonomi Regional dan Sub-Regional</p>	85	80	80	80	80					
<p>38. Indikator: Sejalan dengan Bidang Kerjasama Ekonomi Asia</p> <p>Sasaran kegiatan indikator 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya kesepakatan kerjasama Ekonomi Asia yang terselesaikan 					2.700	3.000	3.270	3.650	4.025	Asdep Kejasama Ekonomi Asia
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama Ekonomi Asia yang terselesaikan</p> <p>Sasaran kegiatan indikator 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelaksanaan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia 	85	80	80	80						
<p>Indikator</p> <p>➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti</p> <p>➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti</p>	85	80	80	80						

<p>Sasaran Kegiatan Indikator 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Peningkatan Peserta alias Menteri Sekretarisasi Hasil-Hasil Kerjasama Ekonomi Asia 			
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atau materi soal-soal hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia • Sasaran kegiatan Indikator 4 • Terwujudnya Dukungan Administratif Kegiatan dan Tata Kelola pada Departemen dan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 	<p>85 80 80 80 80</p>		
<p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Departemen dan Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional <p>35 <u>Koordinasi Kebijakan</u> <u>bidang Kerjasama Ekonomi</u> <u>Multilateral dan Pembangunan</u></p>	<p>12 12 12 12 12</p>	<p>2.000 2.000 2.200</p>	<p>2.425 2.670</p> <p>Asdep Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembangunan</p>
<p>Sasaran kegiatan <u>Indikator 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembangunan <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembangunan yang terwujud 	<p>85 80 80 80 80</p>		

<p>Sasaran Kegiatan Indikator 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Multilateral dan Peralihan yang ditindaklanjuti <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase (%) kesepaktarian kerja sama ekonomi Multilateral dan Peralihan yang ditindaklanjuti 	85	90	80	90	80												
<p>Sasaran Kegiatan Indikator 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Pembaruan Proses atau sistem Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Peralihan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase (%) pemahaman warga sipil mengenai sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Multilateral dan Peralihan 	85	90	80	90	80												

<p>40. <u>Sinergiisasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</u></p>		11.213	11.100	20.366	25.135	50.016	Sekretaris Ressam Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Khusus
<p><u>Sasaran 2 kegiatan terwujud</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi kegiatan sinergi pelaksanaan III No. 30 Tahun 2009 							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang KHK 	75	80	90	80	80		
<p><u>Sasaran 2 kegiatan terwujud 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan Jempolan dan KHK 							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pancajapan IJUK baru 	2	2	7	2	1		
<p><u>Sasaran 2 kegiatan terwujud 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan IJUK 							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase pembaruan penyelenggara KEK 	80	90	90	90	80		
<p><u>Sasaran 2 kegiatan terwujud 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan administrasi dari manajemen 							
<p><u>Indikator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya Layanan Perkantoran 	12	12	12	12	12		

Program/kegiatan Sasaran Program/sasaran kegiatan Indikator kinerja	Target					Aksi dalam jangka waktu					Unit Organisasi pelaksana
	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2017	2018	2019		
Program Ditujukan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						130.493,4	120.130,5	131.603,6	141.116,6	158.829,6	
Sasaran: <u>Program (Output)</u> Meningkatnya budaya kerja organisasi berbasis kompetensi serta taja kerja organisasi yang baik											Setrenko
Indikator											
• Terselase kepatutan terhadap keteluhan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, pengadaan dan kepegawaian	90	90	90	90	90						
♦ Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan	3	3	3	3	3						
• Penerapan penggunaan aplikasi di bidang keselamatan	80	90	90	90	90						
♦ Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar berupa pengendalian	100	100	100	100	100						
• Penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang memenuhi standar kompetensi	75	90	90	90	90						

<p>Sasaran: Program "Otonomi"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselase penunahan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai 		100	100	100	100	100														
<p>1. <u>Penyelaksanaan Belanja dan Pencapaian</u></p> <p>Sasaran: kegiatan (output) 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Bidang Perencanaan <p>2. <u>Penyediaan dan Pencapaian, Ilmiah dan Humanis</u></p> <p>Sasaran: kegiatan (output) 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya serampaian informasi bulik kepada stakeholder terkait dengan pemerintahan peradilan bidang perkeramatan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan komunikasi bulik terkait bidang perkeramatan 											5.150	4.500	4.750	4.900	5.210					Biro Perencanaan
		9.150	7.500	8.080	8.530	9.240				Peta Futuro, Persilangan, dan Humas										

<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator bidang perekonomian 									
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator bidang perekonomian 	1	1	1	1	1				
<p>Sasaran kegiatan (output) 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya dukungan kegiatan mencari keordianer bidang perekonomian dan fasilitasi penyajian raskar? mencari yang efektif dan efisien <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan dukungan kegiatan mencari perekonomian dan fasilitasi penyajian raskar? mencari kebidanan mencari 	1	1	1	1	1				
<p>Sasaran kegiatan (output) 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pertemuan, koordinasi-undangan, pertemuan, dan surat keputusuan di lingkungan Kementerian bidang perekonomian <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan pertemuan, koordinasi-undangan, pertemuan, dan surat keputusuan di lingkungan Kementerian bidang perekonomian 	3	3	3	3	3				

<p>3. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Utama</p>					13.099	125.036,4	115.533,0	127.086,0	130.799,6	Rinc. Tri. 2011
<p><u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u> • Tercapainya layanan administrasi dan peningkatan sumber daya manusia</p>										
<p><u>Indikator:</u> ▶ Pelaksanaan administrasi, Tujuan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pemenuhan sumber daya manusia</p>	12	12	22	12	12					
<p><u>Sasaran Kegiatan (output) 2</u> • Tercapainya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan</p>										
<p><u>Indikator:</u> ▶ Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntansi Insansi (Sistem Akuntansi Keuangan); penyelesaian dan pembinaan pemberdayaan, dan pelaksanaan / verifikasi dokumen anggaran</p>	3	3	3	3	3					
<p><u>Sasaran Kegiatan (output) 3</u> • Terselenggaranya layanan pelayanan dan pemeliharaan barang milik negara</p>										
<p><u>Indikator:</u> ▶ Jumlah bulan Pengelolaan Barang Milik Negara</p>	12	12	22	12	12					

<p>Sasaran kegiatan (output) 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya layanan Ramah Tameng dan Tala Utsaha Timpanan 											
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah bahan pelayanan administrasi dan tata usaha pimpinan 											
	12	12	12	12	12						
<p>Sasaran kegiatan (output) 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran parti dari tunjangan secara tepat waktu 											
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah bulan pembayaran gaji dari tunjangan secara tepat waktu 											
	12	12	12	12	12						
<p>Sasaran kegiatan (output) 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Operasional Berkeadilan 											
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelayanan Operasional Partisipatif dan Pemasalahan 											
	12	12	12	12	12						
<p>Sasaran kegiatan (output) 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa 											
<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah bulan pelayanan pengadaan barang/jasa 											
	12	12	12	12	12						
<p>4. Dan anggaran Irabekotorat</p>											
<p>Sasaran kegiatan (output) 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian krom yang efektif 											
						500	600	630	660	690	Inspektorat

<u>Indikator</u>									
➤ Jumlah pelaksanaan hasil pengawasaan yang dilaksanakan									
	1	2	3	4	5	6			
➤ Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal									
	3	3	3	3	3	3			
5. <u>Penyediaan Kelembagaan Bidang Perencanaan</u>									
<u>Sasaran Kegiatan (output) 1</u>									
• Tersedianya laporan hasil tahunan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan									
<u>Indikator</u>									
➤ Jumlah laporan hasil tahunan yang dilaksanakan dalam rangka rencana kerja upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan									
	5	5	5	5	5	5			

MENYERI KOORINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

DARMIN NASUTION